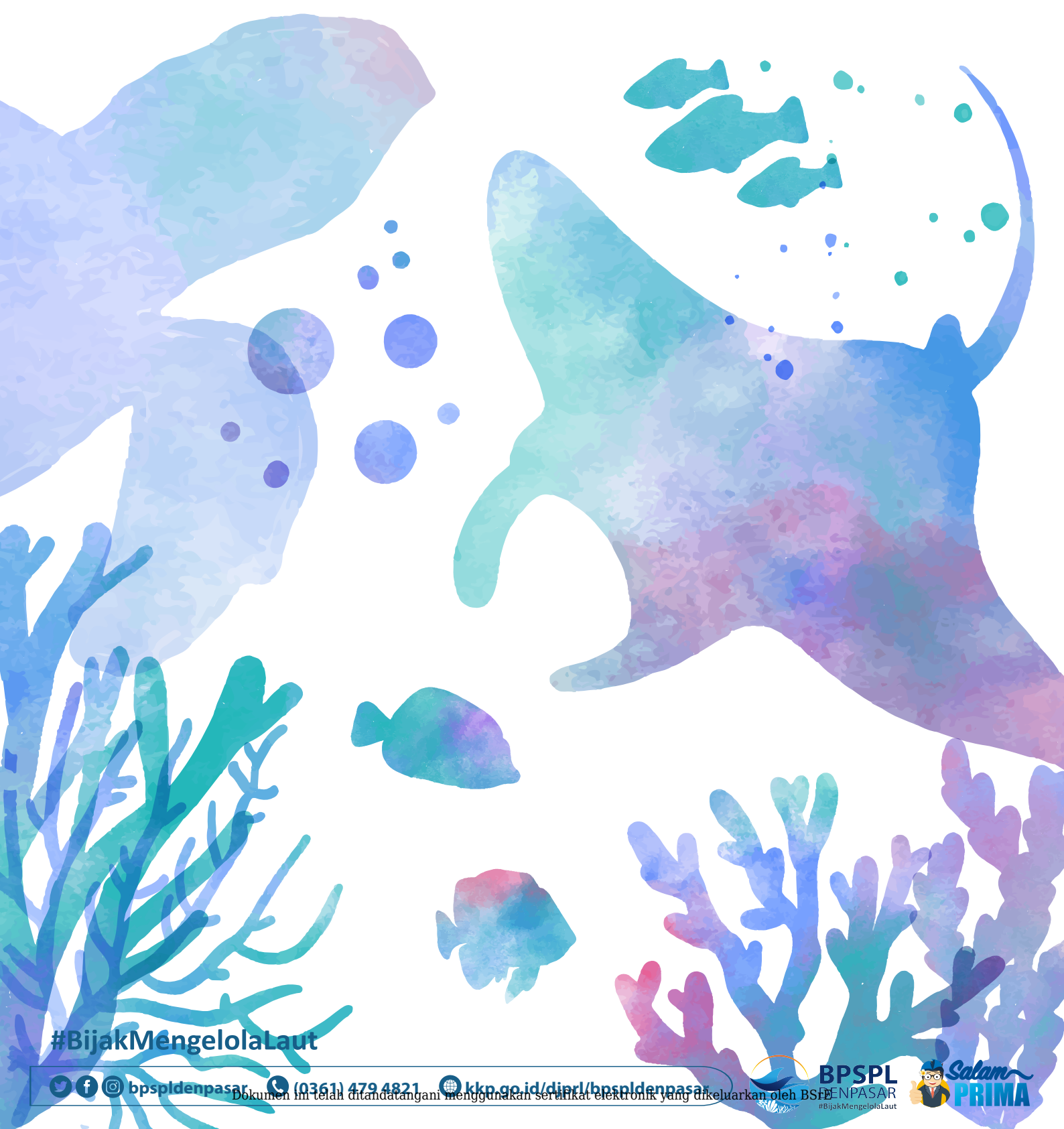




RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUT DENPASAR



#BijakMengelolaLaut

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhoNya sehingga Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar 2020- 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dalam lingkup Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar untuk mengelola kondisi saat ini menuju capaian 5 tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar menjabarkan lebih detail tentang kebijakan dan program Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bagi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dalam mewujudkan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil tertata, produktif, berkelanjutan dan mensejahterakan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Ditetapkan di Gianyar, 29 Desember 2021

Kepala BPSPL Denpasar



Permana Yudiarso, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KONDISI UMUM	3
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	8
1. <i>Potensi.....</i>	8
2. <i>Permasalahan.....</i>	14
D. LINGKUNGAN STRATEGIS	16
BAB II.....	18
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	18
A. VISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	18
B. MISI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	18
C. TUJUAN	19
D. SASARAN	20
BAB III	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA	
KELEMBAGAAN.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
BAB III	23
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA	
KELEMBAGAAN.....	23
A. ARAH KEBIJAKAN DITJEN PRL	23
B. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN BPSPL DENPASAR	23
1. <i>Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:.....</i>	24
2. <i>Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:</i>	24
3. <i>Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui: ...</i>	25
4. <i>Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:</i>	25
5. <i>Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:</i>	25
6. <i>Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:.....</i>	26
C. KERANGKA KELEMBAGAAN	26
BAB IV	28
INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	28
A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2020-2024.....	28
B. KERANGKA PENDANAAN	34
BAB V	35
PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Capaian Dokumen Perencanaan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	5
Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia	10
Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	10
Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	11
Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam

dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Selanjutnya telah ditetapkan pula Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan

Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, menyusun Renstra BPSPL Denpasar Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Periode kurun waktu 2015-2019, telah banyak yang dilakukan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar (BPSPL Denpasar), baik secara kelembagaan maupun program dan kegiatan dilapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada BPSPL Denpasar berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut.

Secara garis besar, target IKU BPSPL Denpasar telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSPL Denpasar terkait mendukung upaya perencanaan ruang laut yaitu pendampingan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah diantaranya :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017–2037
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2038

Adanya UU No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu :

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari PP ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP.
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP
3. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP

PP Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Dit. Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain

- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).

- Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Hasil koordinasi dengan Ditjen. Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi TA. 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya UU Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Dit. PRL memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersama provinsi, UPT DJPRL mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

Tabel 1. Target dan Capaian Dokumen Perencanaan di wilayah kerja BPSPL Denpasar

No	Target Dokumen Perencanaan	Capaian	Keterangan
I.	KAW		
1	Laut Flores	2019	
2	Laut Bali	2021	
3	Laut Sawu	2022	
II.	KSN		
1	Kawasan Perkotaan Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)		
2	Kawasan Bima	2018	Menunggu Proses Harmonisasi di Kumham (Maminasata, Mebidangro,

			Bima, Manado Bitung, Sasamba, Raja Ampat)
3	Taman Nasional Komodo	2018	Permintaan paraf K/L untuk proses penetapan di Setneg (Jabodetabekpunjur, Gerbangkertosusilo, TN.Komodo)
4	Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur		
III.	KSNT		
1	P. Nusabarong (Jawa Timur)	2021	Dokumen Final
2	P. Ngekel (Jawa Timur)	2021	Dokumen Final
3	P. Panikan (Jawa Timur)	2021	Dokumen Final
4	P. Nusapenida (Bali)	2020	Dokumen Final
5	P. Sepatang (Nusa Tenggara Barat)		
6	P. Alor (NTT)		
7	P. Batek (NTT)	2018	Harmonisasi di Kumham
8	P. Ndana (NTT)	2019	Ranpermen Pembahasan Internal KKP
9	P. Rote (NTT)		
10	P. Dana (NTT)		
11	P. Sabu (NTT)		
12	P. Mangudu (NTT)	2018	Harmonisasi di Kumham
IV.	KSNT Non PPKT		
1	Nusapenida – Bali		

Ket. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan belum sesuai PP No.21 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dalam menunjang pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati laut, BPSPL Denpasar telah melakukan berbagai kegiatan dalam pengelolaan jenis ikan dilindungi, pengelolaan kawasan konservasi serta kemitraan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

Dalam rangka konservasi jenis, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar antara lain:

1. Pelayanan perizinan rekomendasi Hiu dan Pari di Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Rekomendasi yang telah terbit selama tahun 2016 – 2019 sebanyak 3.308 surat.

2. Respon cepat penanganan biota laut dilindungi. Penanganan yang telah dilakukan selama tahun 2017-2019 sebanyak 126 kasus mamalia dan hiu paus yang terdampar.
3. Monitoring populasi sebaran biota laut dilindungi meliputi Pari Manta di KKP Nusa Penida, Kab. Klungkung dan di Desa Calabai, Kab. Dompu, serta Mola Mola di KKP Nusa Penida dan perairan Kab. Alor tahun 2015-2017
4. Monitoring Hiu dan Pari meliputi survei potensi, populasi, sebaran, dan pendaratan selama tahun 2015-2019 di Brondong, Prigi, Lamongan, Benoa, Muncar, Pengambengan, Kedonganan, Larantuka, Rote, Tenau, dan Oeba
5. Restocking Kima tahun 2016 di 2 lokasi yaitu Nusa Dua, Bali dan Bangsring, Banyuwangi
6. Monitoring Penyu selama tahun 2017-2019 di Kab. Banyuwangi, Denpasar, Gianyar, dan Jembrana
7. Monitoring Terumbu Karang selama tahun 2017-2019 di Bangsring, , Bondalem, Gili Nanggu, Pulau Kaung, Pulau Bungin, dan Pulau Semaui.
8. Publikasi dan Kampanye Konservasi Jenis Ikan Dilindungi tahun 2017-2019 meliputi Konservasi Goes to School, Coral Triangle Day, pengibaran bendera merah putih di bawah laut, Kemah Pemuda Pesisir, GIS Day, Peringatan Hari Bumi, Kampanye dan Bakti Sosial Penanaman Mangrove, Sosialisasi, Kampanye dan Pembinaan Jenis Ikan, penyediaan papan informasi, dan pencetakan poster serta sticker.

BPSPL Denpasar juga berperan dalam pemberian bantuan pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) melalui pelaksanaan proses identifikasi calon kelompok penerima bantuan KOMPAK. Pada tahun 2018, terdapat 4 kelompok masyarakat yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada tahun 2019, ada 5 kelompok yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam mendukung upaya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, BPSPL Denpasar telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

1. Rehabilitasi kawasan pesisir pada tahun 2016 dengan melakukan penanaman mangrove sebanyak 120.000 batang yang dilaksanakan di Desa Cendimanik, Kabupaten Lombok Barat
2. Pemberian Bantuan Sarana Pengolah Sampah pada tahun 2017 kepada kelompok yang berlokasi di Kab. Klungkung, Surabaya, Kupang, dan Kab. Manggarai Barat.
3. Penyusunan profil sarana dan prasarana pulau-pulau kecil tahun 2018 di 4 lokasi yaitu Pulau Lusi (Lumpur Sidoarjo) Jawa Timur, Pulau Nusa Lembongan Bali, Pulau Gili Gede Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Solor Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, pada tahun 2018 BPSPL Denpasar melakukan pendampingan *acara Our Ocean Conference* (OOC) yang merupakan konferensi khusus kelautan yang digagas oleh Menlu AS terdahulu John Kerry yang membahas isu-isu yang terkait dengan kawasan lindung laut, perikanan berkelanjutan, pencemaran laut, dan dampak terkait iklim laut. Acara ini menghasilkan 315 komitmen baru senilai 10.7 miliar USD, dan pembentukan 14 juta km² Kawasan Konservasi Perairan baru

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Secara geografis posisi Indonesia sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 8,3 juta km² dengan jumlah pulau mencapai 17.504 pulau dimana 16.671 pulau sudah dibakukan dan dilaporkan ke PBB. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta

km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², dan ZEE Indonesia mencapai 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km² dan panjang garis pantai 108.000 km (Ditjen PRL, 2020).

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Lautan Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecilnya menyimpan banyak potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “*services*” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir, yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Terumbu Karang merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan estetika yang tinggi, total luasan Terumbu Karang di Indonesia berdasarkan data dari LIPI 2.517.818 HA dengan keanekaragaman yang sangat beragam hingga ratusan lebih jenis karang. Sedangkan Padang lamun menyediakan perlindungan dan makanan bagi beberapa jenis ikan dan kerang-kerangan ekonomis penting. Total luasan Padang Lamun di Indonesia mencapai 1.507 Km² Dengan keanekaragaman jenis. Selain itu terdapat potensi mangrove kritis dan non

kritis, ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi dan manfaat yang beraneka ragam bagi manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tabel 2. Luasan Terumbu Karang di Indonesia

No	Regional	Luas (Ha)
1	Sulawesi	862,627
2	Sumatera	478,587
3	Maluku	439,110
4	Nusa Tenggara	272,123
5	Papua	269,402
6	Kalimantan	119,304
7	Jawa	67,869
8	Bali	8,837
Total		2,517,858

Sumber: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI

Tabel 3. Luasan Mangrove di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	PROVINSI	Kritis	Non Kritis
		LUAS (HA)	LUAS HA
1	JAWA TIMUR	6166.809	1340.974
2	BALI	126.193	32.16374
3	NTB	3526.509	3322.79
4	NTT	1859.784	4440.741

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Wilayah Perairan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara selain memiliki potensi sumberdaya ikan baik perikanan budidaya maupun tangkap, juga memiliki potensi biota lainnya baik endemik, langka, dan dilindungi dari kelompok cetacean, crustacean, Bivalvia, testudinata (penyu), maupun kelas pisces.

Tabel 4. Potensi Perikanan di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

No.	Provinsi	Potensi Perikanan	
		Budidaya (Ha)	Tangkap (ton/tahun)
1	Bali	12.679.041	95.014
2	Jawa Timur	856.487.585	481.499
3	NTB	392.344.829	220.732
4	NTT	92.773.720	123.652

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar juga terdapat beranekaragam biota laut dilindungi yang dapat dilakukan pendataan dan monitoring. Biota tersebut dapat ditemukan di beberapa lokasi antara lain:

- Jawa Timur: Hiu Paus (Probolinggo), Hiu dan Pari Appendiks (Muncar-Banyuwangi, Brondong-Lamongan, Prigi-Trenggalek), Penyu (Banyuwangi, Trenggalek), Terumbu Karang (Banyuwangi, Kangean)
- Bali: Penyu (Gianyar, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, Buleleng), Hiu Appendiks (Benoa, Karangasem), Lumba-lumba (Lovina, TNBB), Terumbu Karang (Buleleng, Denpasar, Badung, Nusa Penida), Pari Manta (Nusa Penida-Klungkung)
- NTB: Penyu (Mataram, Kab. Sumbawa), Hiu Pari Appendiks (Tj. Luar, Sumbawa), Terumbu Karang (Lombok Utara, Sumbawa), Hiu Paus (Teluk Saleh-Sumbawa)
- NTT: Dugong (Alor), Lumba-lumba (Alor), Penyu (Lembata, Pulau Solor - Flores Timur), Terumbu Karang (Alor, Sikka, Ende), Teripang (Rote, Riung), Paus (Lembata), Pari Manta (Labuan Bajo), Hiu Pari Appendiks (Namosain-Kupang, Papela-Rote)

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPSPL Denpasar melakukan kerjasama dengan kelompok masyarakat dengan memberikan bantuan KOMPAK berupa alat monitoring. Selain itu, BPSPL Denpasar juga menjalin kerjasama dengan instansi melalui kesepakatan perjanjian kerjasama di seluruh wilayah kerja.

Pada sektor pemanfaatan jasa kelautan, wilayah kerja BPSPL Denpasar menyimpan potensi garam (Kab Tuban, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan), biofarmakologi, dan desa wisata bahari. Potensi tersebut tersebar di seluruh wilayah BPSPL Denpasar dan perlu dilakukan identifikasi agar dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di wilayah kerja BPSPL Denpasar, terdapat banyak Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil baik yang telah ditetapkan maupun yang sedang dalam proses penetapannya. Adapun status penetapan dan peraturan yang mengatur tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. KKP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

NO	NAMA KAWASAN (KKP3K)	PROVINSI	KABUPATEN	LUAS (HA)	STATUS PENETAPAN	SK PENCADANGAN / PENETAPAN
1	KKPD Nusa Penida	Bali	Klungkung	20,057.00	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018 mengganti KEPMENKP No. 24/KEPMEN-KP/2014
2	KKPD Buleleng	Bali	Buleleng	14,041.13	PENCADANGAN	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011
3	KKPD Jembrana	Bali	Jembrana	3,532.52	PENCADANGAN	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013 tanggal 30 Desember 2013
4	KKPD Karangasem	Bali	Karangasem	5,856.31	PENCADANGAN	KEPUB BALI 375/03-L/HK/2017 tanggal 19 Januari 2017
5	KKM Teluk Bena	Bali	Badung dan Denpasar	1,243.41	PENETAPAN MKP	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019
6	KKPD di Kabupaten Sidoarjo	Jawa Timur	Sidoarjo	72.32	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
7	KKPD di Kabupaten Probolinggo	Jawa Timur	Probolinggo	374.07	Sudah ditetapkan MKP	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/KEPMEN-KP/2020 tanggal 10 Juni 2020
8	KKPD di Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur	Pasuruan	4073.74	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
9	KKPD di Kabupaten Situbondo	Jawa Timur	Situbondo	123.181	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
10	KKPD di Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur	Tulungagung	217	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
11	KKPD di Kabupaten Sumenep	Jawa Timur	Sumenep	72026.14	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
12	KKPD di Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	Banyuwangi	412.68	Pencadangan	SK Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/569/KPTS/013/2018 tanggal 10 Oktober 2018
13	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang	N T B	Kab. Lombok Timur	10000	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 92/KEPMEN-KP/2018
14	TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak	N T B	Kab. Lombok Barat	21132.82	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 93/KEPMEN-KP/2018
15	TWP Pulau Liang dan Ngali	N T B	Kab. Sumbawa	32644.43	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 20/KEPMEN-KP/2020
16	TWP Gili Banta	N T B	Kab. Bima	40276.54	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 21/KEPMEN-KP/2020

17	SAP Teluk Cempi	N T B	Kab. Dompu	22257.45	Penetapan Oleh Menteri KP	SK Menteri KP: Nomor 22/KEPMEN-KP/2020
18	TWP Teluk Bumbang	N T B	Kab. Lombok Tengah	6310	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
19	TPK Gili Balu	N T B	Kab. Sumbawa Barat	6005.2	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
20	TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	N T B	Kab. Sumbawa	2000	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
21	TP Penyutatar Sepang-Lunyuk	N T B	Kab. Sumbawa dan Kab. Sumbawa Barat	72415.29	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
22	SAP Pulau Lipan dan Pulau Rakit	N T B	Kab. Sumbawa	26640.81	Pencadangan	Keputusan Gubernur NTB: Nomor 523-640/2018
23	KKP3K Pulau Panjang	N T B	Kab. Sumbawa	22138.47	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
24	KKP Pulau Medang	N T B	Kab. Sumbawa	11339.56	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
25	KKP3K Pulau Kelapa	N T B	Kab. Bima	6947.28	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
26	KKP3K Pulau Sangiang	N T B	Kab. Bima	48610.01	Dalam Dokumen RZWP3K	Peraturan Daerah Provinsi NTB: Nomor 12/2017
27	KKPD Flores Timur	NTT	Flores Timur	150,000.00	Dicadangkan	Kep Gubernur No 308/KEP/HK/2017
28	KKPD Sikka	NTT	Sikka	207,062.92	Dicadangkan	Kep Gubernur No 107A/KEP/HK/2018
29	KKPD Lembata	NTT	Lembata	76,722.06	Dicadangkan	KepGub NTT nomor 192/Kep/HK/2019
30	KKPD SAP Selat Pantar	NTT	Alor	276,693.38	Ditetapkan	Kepmen KP Nomor 35/KEPMEN-KP/2015

PPKT adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun (seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Wilayah kerja BPSPL Denpasar memiliki 12 pulau-pulau kecil terluar dengan rincian:

- a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Pulau Alor, Pulau Batek, Pulau Rote, Pulau Ndana, Pulau Sabu, Pulau Dana, dan Pulau Mangudu
- b. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa)
- c. Provinsi Bali: Pulau Nusa Penida
- d. Provinsi Jawa Timur: Pulau Nusabarong (Pulau Barong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan

Selain menyimpan potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga menyimpan potensi bahaya yang dapat membawa bencana apabila kita kurang bijak dalam mengelolanya. Bencana ini tidak hanya yang terjadi secara alami, seperti gempa bumi dan tsunami, namun juga akibat ulah manusia dalam melakukan pembangunan seperti reklamasi atau alih fungsi lahan pesisir yang tidak ramah lingkungan.

2. Permasalahan

BPSPL Denpasar memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kendala ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dokumen pendukung. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap KKPD yang telah ditetapkan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan KKPD. Selain itu adanya permasalahan tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan yang melebihi daya dukung, dan pencemaran. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Zonasi
2. Monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Diperlukan juga perizinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL)
3. Pemanfaatan jenis ikan khususnya Hiu dan Pari masih tinggi dan merupakan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Wilayah kerja BPSPL Denpasar merupakan pintu ekspor Hiu dan Pari dengan

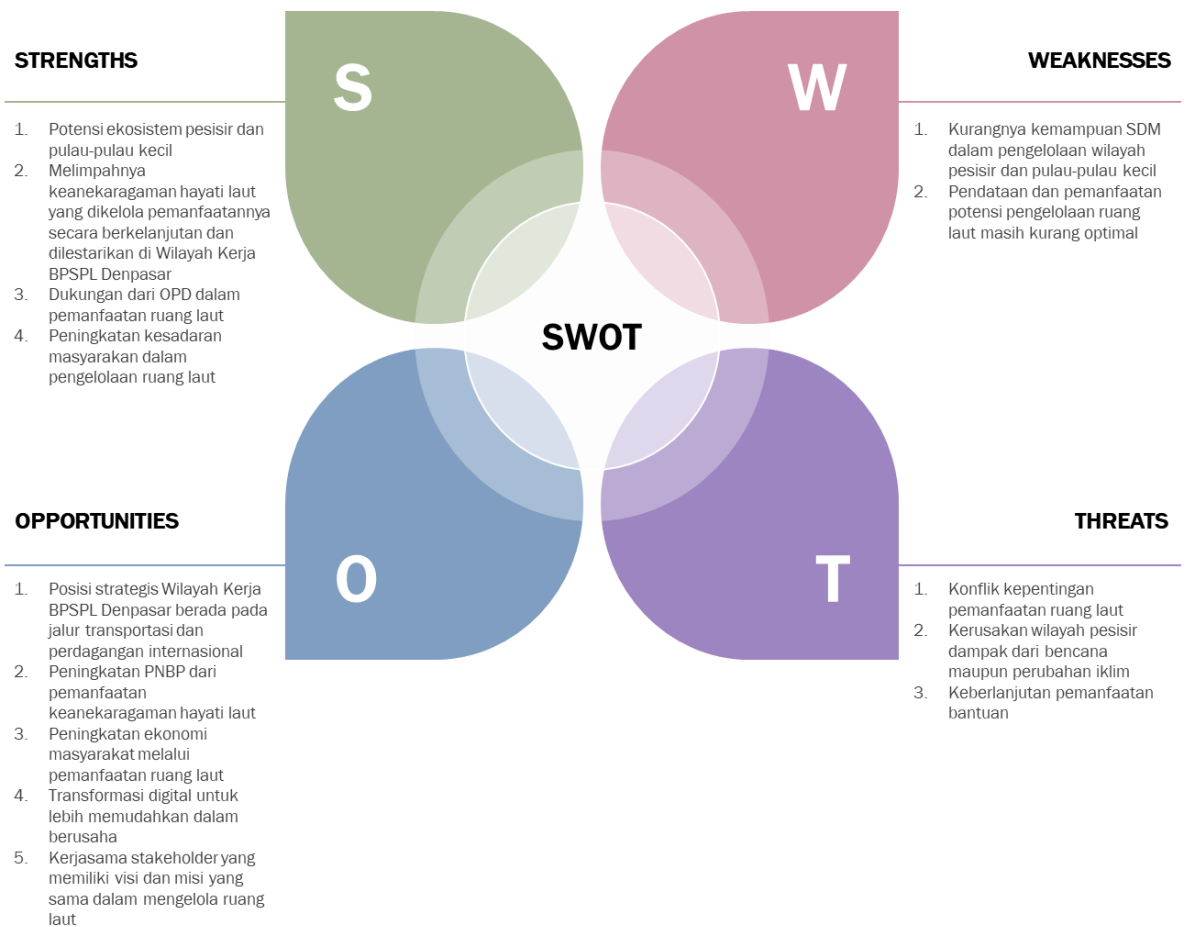
jumlah dokumen sebanyak 2.412 dokumen sejak tahun 2017 – 2019 baik domestik maupun ekspor. Dalam hal ini BPSPL Denpasar terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kapasitas SDM, sarana prasarana pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi terkait pemanfaatan jenis ikan. Selain itu perlu adanya regulasi yang mengatur PNBP.

4. Belum adanya keseragaman data series keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar. Perlu adanya metode dan standard yang dibuat untuk pendataan.
5. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, pemanfaatan kayu mangrove sebagai bahan baku arang serta maraknya alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove. Perlunya identifikasi lahan mangrove untuk direhabilitasi kembali.
6. Permasalahan terkait terumbu karang yaitu dijumpainya kelompok kapal penangkapan ikan yang melabuhkan jangkarnya di sekitar terumbu karang yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Terjadinya kasus penyakit pada terumbu karang yaitu pemutihan karang di Buleleng, Sanur, munculnya hama/predator. Perlu dilakukan monitoring dan sosialisasi secara berkala untuk menanggulangi dan mencegah semakin banyaknya kerusakan karang.
7. Aktivitas nelayan yang menambatkan kapal di sekitar padang lamun menyebabkan lamun dapat tergerus lunas kapal, selain itu ancaman tumpahan minyak hasil buangan kapal serta banyaknya suplai sedimen atau lumpur yang berasal dari daratan atau sungai yang bermuara ke laut yang dapat menyebabkan penempelan pada lamun yang dikhawatirkan mempengaruhi proses fotosintesis dimana dampaknya pada tingkat produktivitas primer yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisme.

8. Aktivitas destructive fishing yang masih terjadi di beberapa perairan di Wilayah kerja BPSPL Denpasar. Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.
9. Pengelolaan sektor garam yang masih terus digalakkan dengan permasalahan rendahnya kualitas garam konsumsi melalui program Peningkatan kualitas garam konsumsi, Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan lahan integrasi pegaraman dan sistem tunnel garam. Perlu dilakukan identifikasi terhadap kelompok masyarakat yang dapat mengelola dan memanfaatkan usaha garam.
10. Sebaran potensi, dan kelompok masyarakat pengelola jasa kelautan belum teridentifikasi sepenuhnya. Selain itu, pendampingan terhadap keberlanjutan bantuan pemanfaatan jasa kelautan masih belum optimal.
11. Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik. Perlu adanya peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis SWOT berikut ini.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Denpasar adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar **menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL**”

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan

- Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
 4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Denpasar, maka, ditetapkan Misi BPSPL Denpasar yaitu:

1. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar;
2. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar;
3. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
4. Perencanaan Ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup BPSPL Denpasar.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Denpasar merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil dengan tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta

meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

2. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
4. Misi Perencanaan Ruang laut dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
5. Misi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar.

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah BPSPL Denpasar merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen Ditjen PRL pada tahun 2020-2024. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Denpasar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan sasaran kegiatan
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar;

- c. Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - d. Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar;
 - e. Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
2. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan sasaran kegiatan:
- a. Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar;
3. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan sasaran kegiatan:
- a. Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar
 - b. Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar
4. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Denpasar dengan sasaran

kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar

5. Tujuan meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Denpasar. Dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Ditjen PRL sebagai salah satu unit eselon I Lingkup KKP telah merumuskan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 yang memerlukan dukungan BPSPL Denpasar yaitu:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

B. Strategi Pelaksanaan Kegiatan BPSPL Denpasar

Strategi pelaksanaan kegiatan BPSPL Denpasar yang akan ditempuh untuk masing – masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - d. Pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BPSPL Denpasar.

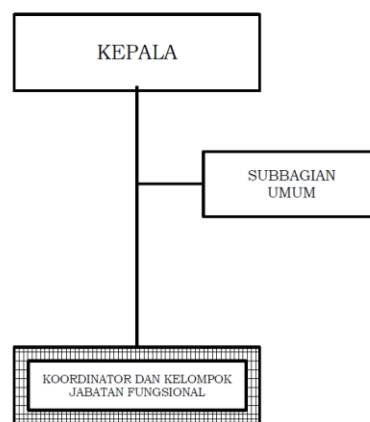
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
 - a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - h. Pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar;

- j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
 - a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:
 - a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Penanaman Mangrove di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - d. Identifikasi dan/atau fasilitasi kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang akan dikendalikan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - e. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar.
5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
 - a. Pembangunan sarana dan/atau prasarana sentra ekonomi garam rakyat di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
 - b. Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar;

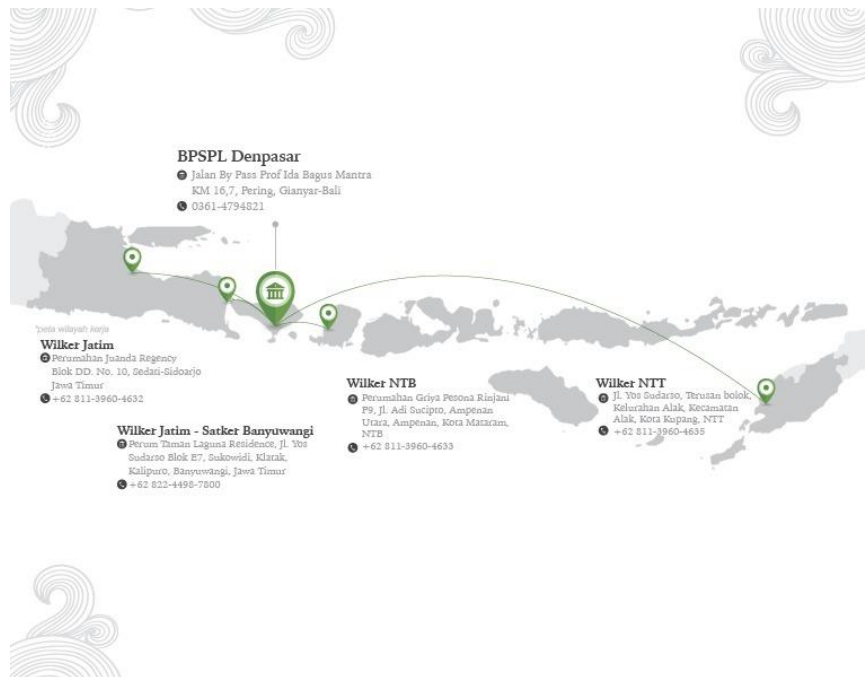
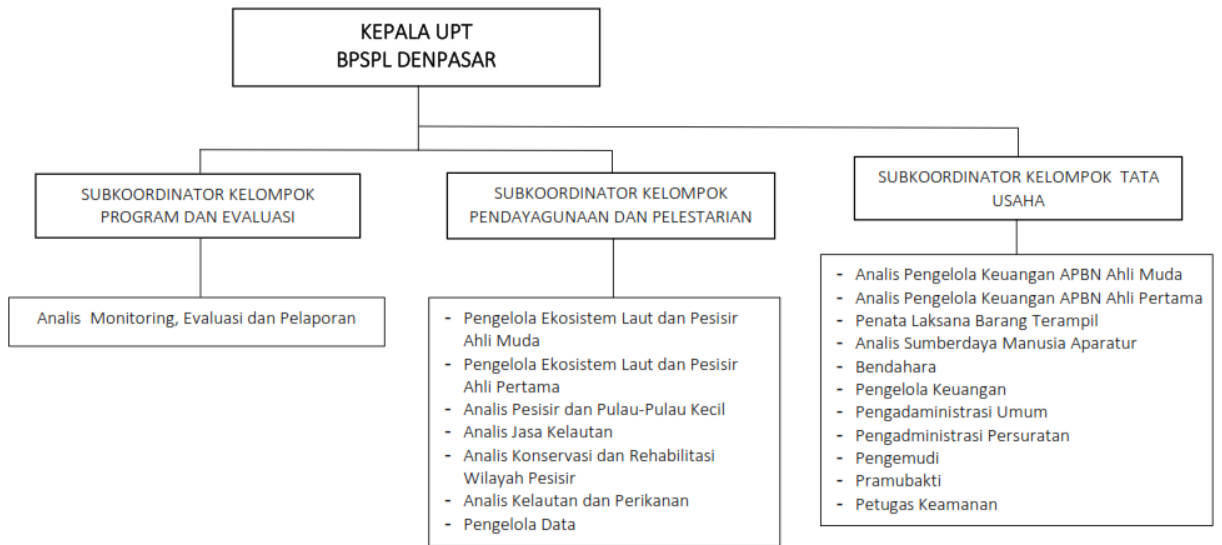
- c. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar;
- 6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BPSPL Denpasar;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPSPL Denpasar
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSPL Denpasar;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BPSPL Denpasar;

C. Kerangka Kelembagaan

Adapun untuk struktur organisasi BPSPL Denpasar sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana berikut:



Penataan kelembagaan BPSPL Denpasar akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Penataan kelembagaan BPSPL Denpasar selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan redesign nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di BPSPL Denpasar.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BPSPL Denpasar

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka BPSPL Denpasar telah menyusun Program beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja BPSPL Denpasar 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPSPL Denpasar 2020 – 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Ha)	6.379,27	20.767,11	20.767,11	20.767,11	20.767,11
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	5	5	5	5
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar	3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	6	6	6

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	1	4	4	4	4
		5	Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	10	10	10	10	10
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	10	10	10	10	10
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1
6	Meningkatnya	9	kawasan pesisir dan pulau-pulau	1	0	1	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja Denpasar		kecil yang diidentifikasi dan /atau difasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)					
7	Meningkatnya ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar	10	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	0	0	0	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar	11	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
9	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar	12	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (unit)	4	0	1	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
10	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar	13	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar	14	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1
12	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar	15	Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di Wilayah kerja BPSPL Denpasar (lokasi)	0	0	0	1	1
13	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar	16	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (pulau)	0	0	0	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
14	Tatakelola	17	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan	0	72,5	72,5	72,5	72,5

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar	Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)					
18		Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (indeks)	72	73	74	75	76
19		Nilai WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	72	76	76	78	78
20		Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Denpasar (%)	90	91	91	92	92
21		Persentase unit kerja BPSPL Denpasar yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
22		Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
23		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)	88	89	89	90	90
24		Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	85	86	87	88	89
25		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Kerangka indikasi pendanaan Ditjen PRL tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp 988,1milyar. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Denpasar 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis BPSPL Denpasar tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024

Rencana Strategis BPSPL Denpasar 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) BPSPL Denpasar dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis BPSPL Denpasar tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

**MATRIK KERANGKA PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) DENPASAR
2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. JUTA)					TOTAL 2020-2024 (Rp. MILYAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL BPSPL DENPASAR						27,511	20,715	33,68	33,21	34,43	149,546	
Program Kualitas Lingkungan Hidup						10,161	10,48	10,58	10,88	10,98	53,081	
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut						1,511	1,980	2	2,2	2,25	9,941	
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar						0,05	0,15	0,1	0,15	0,15	0,6
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Ha)	6.379,27	20.767,11	20.767,11	20.767,11	20.767,11						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Denpasar						0,081	0,39	0,5	0,55	0,6	2,121
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan,	5	5	5	5	5						

penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)												
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Denpasar							0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,5
Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Jenis)	5	6	6	6	6							
Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar							0,48	0,54	0,5	0,6	0,6	2,72
Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kelompok)	1	4	4	4	4							
Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kesepakatan)	1	1	1	1	1							

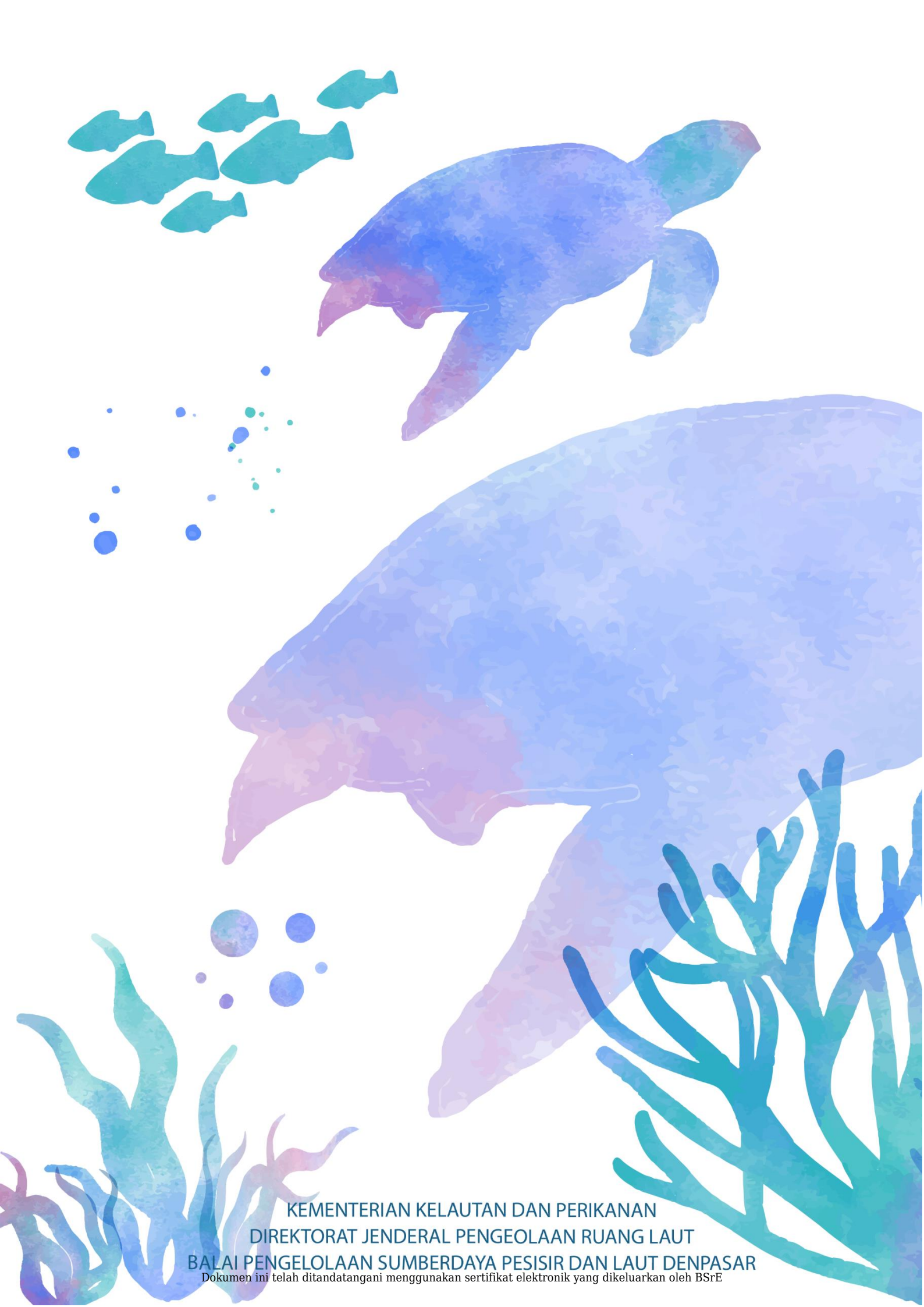
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							8,65	8,5	8,58	8,68	8,73	43,14
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar						8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	42,5
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	10	10	10	10	10						
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	10	10	10	10	10						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1						
	Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja Denpasar						0,15	0	0,08	0,08	0,08	0,39
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan /atau fasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Denpasar (kawasan)	1	0	1	1	1						
	Meningkatnya ketangguhan Kawasan						0	0	0	0,1	0,15	0,25

	pesisir dan pulau pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar											
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							8,35	0,235	12,1	10,33	10,45	41,465
Perencanaan Ruang Laut							0	0	0,4	0,5	0,6	1,5
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar						0	0	0,4	0,5	0,6	1,5
	Laporan Pendampingan RZ KAW, KSN/T dan Integrasi RZWP3K di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1	0	0	0,2	0,25	0,3	0,75
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Denpasar (dokumen)	0	0	1	1	1	0	0	0,2	0,25	0,3	0,75
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							8,35	0,235	11,7	11,75	11,75	43,785
	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Denpasar						8,2	0,215	11,5	11,5	11,5	42,915

	Sarana dan/atau prasarana di Kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Denpasar (unit)	4	0	1	1	1						
	Terkelolanya Biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Denpasar						0,15	0,02	0	0	0	0,17
	Laporan Identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk Biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Denpasar (dokumen)	1	1	0	0	0						
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Denpasar						0	0	0,2	0,25	0,25	0,7
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Denpasar (Kawasan)	0	0	0	1	1						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							0	0	0	0,13	0,13	0,26
	Meningkatnya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil/ Terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di Wilayah Kerja BPSPL Denpasar						0	0	0	0,08	0,08	0,16
	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi sarana dan prasarannya di Wilayah Kerja BPSPL	0	0	0	1	1						

	Denpasar (lokasi)												
	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar							0	0	0	0,05	0,05	0,1
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Denpasar (pulau)	0	0	0	1	1							
Program Dukungan Manajemen								9	10	11	12	13	55
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut													
	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Denpasar												
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Denpasar (%)	-	72,5	72,5	72,5	72,5							
	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Denpasar (indeks)	72	73	74	75	76							
	Nilai WBK BPSPL Denpasar (Nilai)	72	76	76	78	78							
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Denpasar (%)	90	91	91	92	92							
	Persentase unit kerja BPSPL Denpasar yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90							
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup	60	65	70	75	80							

	BPSPL Denpasar yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)											
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Denpasar (Nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Denpasar (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Denpasar (%)	100	100	100	100	100						



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEOLAAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E